



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta Hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan diajukan dan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai wujud manajemen kerja yang terencana dan terukur sehingga dapat diperkirakan output yang akan diwujudkan pada tahun mendatang. Renja 2025 ini merupakan wujud perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.

Kami menyadari Rencana Kerja Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan, oleh karena itu Kami sangat berharap mendapat masukan, saran dan kritik terhadap penulisan dan isi dari Renja Perubahan ini sehingga kedepan dapat diperbaiki dan lebih baik lagi.

Sungai Raya, 2025

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan



H. ELFIZAR EDRUS, S.Sos, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710114 199203 1

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2.DASAR HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	13
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	30
2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI	35
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	54
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	59
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	60
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISBUN	44
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	61
BAB IV PENUTUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun memuat tentang rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah keterkaitan dengan RPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

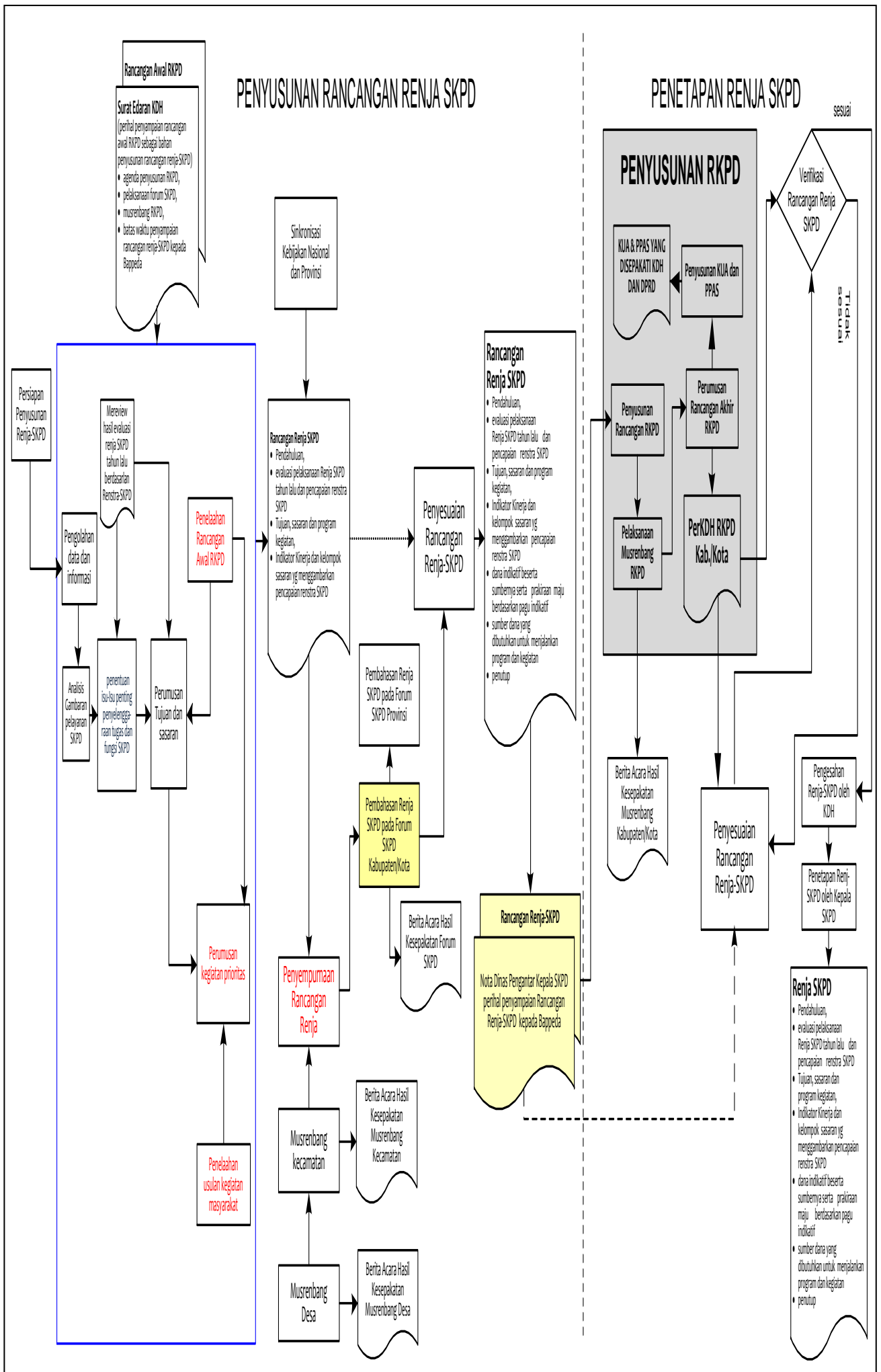
- 1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Sasaran dan Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
- 2) Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- 3) Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan mengacu pada RPD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Sebagai perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Kubu Raya di bidang Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis bidang Perkebunan dan Peternakan serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Bagan Air Tahapan Penyusunan RENJA

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6780);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan atau Produk Hewan dalam hal tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
 18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
 25. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 101, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem

- Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
29. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 30. Peraturan Presiden 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
 31. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 36. Peraturan Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan

- Kemiskinan Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
 39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
 40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
 43. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
 44. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 28);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
 48. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021);
 49. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10);
 50. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 11);
 51. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

➤ Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi aparatur pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 sesuai

dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kubu Raya.

➤ Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2025

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini akan memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2019 sampai 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Dinas Perkebunan dan Peternakan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, Dinas Perkebunan dan Peternakan pada tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai satu perangkat daerah.

Perkembangan Dinas Perkebunan dan Peternakan selama beberapa waktu telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain :

- Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan (Tahun 2016 sd Tahun 2019);
- Dinas Perkebunan (Tahun 2019 sd Tahun 2021);
- Dinas Perkebunan dan Peternakan (Tahun 2021 sd saat ini).

Untuk melihat program dan kegiatan dan realisasinya serta capaian kinerja utama perjalanan Dinas Perkebunan dan Peternakan selama beberapa tahun dilihat pada uraian tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Anggaran dan Realisasi Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2023

Program Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.742.661.819,00	5.254.586.193,00	91,50
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.465.870,00	60.465.870,00	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.600,00	3.999.600,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.898.940,00	3.898.940,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD	2.249.460,00	2.249.460,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.863.090,00	5.863.090,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.454.780,00	44.454.780,00	100,00
Admisnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.352.991.789,00	4.083.307.689,00	93,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.343.293.763,00	4.073.675.399,00	93,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.998.456,00	3.967.720,00	99,23
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.699.570,00	5.664.570,00	99,39
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.313.384,00	45.478.800,00	98,20
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.313.384,00	45.478.800,00	98,20
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.717.968,00	155.687.022,00	96,87
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.280.000,00	44.080.000,00	97,35
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	81.209.968,00	81.187.587,00	99,97
Bimbingan Teknis beserta Atribut Kelengkapannya	34.228.000,00	30.419.435,00	88,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.126.613,00	420.201.382,00	95,69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.000,00	1.498.000,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.091.801,00	56.930.201,00	98,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.630.712,00	128.484.125,00	99,89

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.949.100,00	45.934.150,00	99,97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.957.000,00	182.354.906,00	91,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.135.893,00	107.890.000,00	42,62
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.135.893,00	107.890.000,00	42,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	376.786.182,00	330.089.068,00	87,61
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.620.000,00	57.340.033,00	74,84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.166.182,00	272.749.035,00	90,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.124.120,00	51.466.362,00	96,88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.202.500,00	29.202.500,00	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.951.620,00	2.293.862,00	58,05
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.970.000,00	19.970.000,00	100,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.389.704.338,00	2.895.661.468,00	85,43
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	962.558.990,00	946.813.490,00	98,36
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	962.558.990,00	946.813.490,00	98,36
Pengelolaan Sumber Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.285.669.139,00	1.196.644.508,00	93,08
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	112.945.985,00	65.049.575,00	57,59
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	49.999.783,00	49.999.760,00	100,00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.122.723.371,00	1.081.595.173,00	96,34
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.916.280,00	53.516.280,00	95,71
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	55.916.280,00	53.516.280,00	95,71

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.085.559.929,00	698.687.190,00	64,36
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.085.559.929,00	698.687.190,00	64,36
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	501.939.674,00	496.834.810,00	98,98
Pengembangan Prasarana Pertanian	173.588.339,00	171.152.915,00	98,60
Penyusunan Masterplan pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	173.588.339,00	171.152.915,00	98,60
Pembangunan Prasarana Pertanian	257.224.050,00	254.554.647,00	98,96
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	257.224.050,00	254.554.647,00	98,96
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	71.127.285,00	71.127.248,00	100,00
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	71.127.285,00	71.127.248,00	100,00
Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	757.560.747,00	752.573.352,00	99,34
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	249.872.452,00	247.347.876,00	98,99
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	249.872.452,00	247.347.876,00	98,99
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.144.915,00	301.082.096,00	99,98
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	301.144.915,00	301.082.096,00	99,98
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	206.543.380,00	204.143.380,00	98,84
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	104.974.980,00	102.574.980,00	97,71
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	101.568.400,00	101.568.400,00	100,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	285.113.954,00	281.845.742,00	98,85
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	119.404.639,00	116.682.512,00	97,72

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	165.709.315,00	165.163.230,00	99,67
Program Perizinan Usaha Pertanian	262.890.094,00	257.124.643,00	97,81
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	262.890.094,00	257.124.643,00	97,81
Penilaian kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	113.249.695,00	108.604.275,00	95,90
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	149.640.399,00	148.520.368,00	99,25
Program Penyuluhan Pertanian	135.564.955,00	132.877.870,00	98,02
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	135.564.955,00	132.877.870,00	98,02
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	135.564.955,00	132.877.870,00	98,02
Jumlah	11.075.435.581,00	10.071.504.078,00	90,94

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.2.2 Capaian dan Evaluasi Program/Kerja Tahun 2023

Dinas Perkebunan dan Peternakan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, DISBUNNAK pada tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai satu perangkat daerah.

Untuk melihat Capaian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2024 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada uraian tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	27 01...	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	100 Persen	BB (73,10)	BB (70-80)	BB (74,10)	BB (100%)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)
3	27 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	27 01 2,01 0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	27 01 2,01 0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
3	27	01	2,01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	27	01	2,01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	5 laporan	5 laporan	100%
3	27	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	27	01	2,02	...	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100%
3	27	01	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	08 Orang/Bulan	12 bulan	54	33	100	53	53	100%
3	27	01	2,02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
3	27 01 2,02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3 Laporan	2 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100%
3	27 01 2,03	...	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	%	100 Persen	100	100	100	100	100	100	100%
3	27 01 2,03	0001	Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	27 01 2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	27 01 2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4 Laporan				1 Laporan	1 Laporan	100%
3	27 01 2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100 Persen	100	100	100	100			
3	27 01 2,05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	127 Paket		100	100	100			
3	27 01 2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	111 Orang	1 Kegiatan	60 Orang	60 Orang	100	95 Orang	95 Orang	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
3	27	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	111 Orang	1 Kegiatan	60 Orang	60 Orang	100	95 Orang	95 Orang	100%
3	27	01	2,05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20 Orang	2 ASN	5 Orang	3 Orang	100	2 orang	2 orang	100%
3	27	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100 Persen				100			
3	27	01	2,06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
3	27	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (korden, karpet)	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	16 Unit	1 Paket	1 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100%
3	27	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%
3	27	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		
					Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	27	01	2,06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3 dokumen	12 Bulan	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Paket	1 Paket	100%
3	27	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3 Laporan	12 Bulan	108 laporan	108 laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	27	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	27 Unit							100%
3	27	01	2,07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25 Unit		2 unit	65 Unit		3 Unit	3 Unit	100%
3	27	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit					4 Unit	4 Unit	100%
3	27	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3 Laporan							
3	27	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	36 Laporan	36 Laporan	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
3	27	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	27	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	200 Unit							
3	27	01	2,09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24 Unit		1 Unit	1 Unit	100			
3	27	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya	unit	28 U nit	11 kendaraan	15 Unit	15 Unit	100	12 Unit	12 Unit	100%
3	27	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125 Unit					35 Unit	35 Unit	100%
3	27	01	2,09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 Unit		3 Unit	3 Unit	66,67%	3 Unit	3 Unit	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pekebunan	Ton/Ha/tahun	210,34	1,93	2,34	2,26	90,80%	3,5	3,5	100%
						Produksi Peternakan	Ton/Thn	211,50	21214	3,50	18236		3,5	3,5	100%
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	Laporan	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan				100%
3	27	02	2,01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	6 Laporan	6 Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan SDG hewan/tumbuhan	Laporan	6 Laporan							100%
3	27	02	2,02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	3 Laporan	1 Komoditas	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	27	02	2,02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	3 Laporan	155 Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	27	02	2,02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman/Hewan	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	3 VUB		1 VUB	1 VUB	100	1 VUB	1 VUB	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3 27 02 2,03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Laporan	24 Laporan							
3 27 02 2,03 0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	24 Laporan	9 Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	100	8 Laporan	8 Laporan	100%
3 27 02 2,06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Laporan	3 Laporan							
3 27 02 2,06 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	1926 ekor					7 ekor	7 ekor	100%
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Daya dukung prasarana perkebunan terhadap produktivitas kebun	%	100 Persen		0,2	0,2		100	100	100%
		Daya dukung prasarana peternakan terhadap produktivitas ternak	%	101 Persen		1	1		100	100	100%
3 27 03 2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan prasarana pertanian	Laporan	3 Laporan							
3 27 03 2,01 0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	dokumen	2 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3 27 03 2,01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2 Laporan					1 laporan	1 laporan	100%
3 27 03 2,01 0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
3 27 03 2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan, Pemeliharaan, dan rehabilitasi prasarana pertanian	Laporan	3 Lporan							
3 27 03 2,03 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3 Unit	9 Kecamatan	1 Unit	1 Unit		2 Unit	2 Unit	100%
3 27 03 2,03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	15 Laporan							
3 27 03 2,03 0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	15 Laporan	9 Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Status Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	%	100		100	98,96		100	100	100%
3 27 04 2,01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyakit hewan yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	laporan	18 laporan		100	98,96		100	100	100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3 27 04 2.01 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	36 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100%
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah sample dan Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Laporan	3 Laporan							100%
3 27 04 2.03 0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	3 Laporan	9 Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	laporan	2 Laporan							100%
3 27 04 2.04 0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	45 Laporan	4 Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan		25 laporan	25 laporan	100%
3 27 04 2.04 0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha								100%
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Perlindungan perkebunan	%	100 Persen		100	76		100	100	100%
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana perkebunan Kabupaten	laporan	3 Laporan							100%

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3 27 05 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	150 Ha	9 Kecamatan	150 Ha	150 Ha		150 Ha	150 Ha	100%
3 27 05 2.01 0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	50.000 Ha	9 Kecamatan	50.000 Ha	50.000 Ha		50.000 Ha	50.000 Ha	100%
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perkebunan terdaftar	%	100 Persen		70	72		100	100	100%
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin usaha pertanian	Laporan	9 Laporan							100%
3 27 06 2.01 0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	6 Dokumen	15 Pertek				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3 27 06 2.01 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	6 Dokumen					4 Laporan	4 Laporan	100%
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Perkebunan yang dibina	%	100 Persen		100%	1,96%		100	100	100%
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani pekebun terbina	Laporan	3 laporan							100%
3 27 07 2.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3 laporan	2 kelompok	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian sub sektor perkebunan dan peternakan berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

a. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas:

memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
- pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas;
- pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan program bidang perkebunan dan peternakan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat mempunyai tugas: membantu kepala dinas dalam penyusunan rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum. Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan,serta tata usaha, kepegawaian,perlengkapan dan umum
- Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi,koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengendalian kegiatan di Dinas;
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Produksi dan Perbenihan mempunyai fungsi: membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang produksi, dan pembenihan pada kegiatan Pembangunan dan Pengawasan Sarana Pertanian.

d. Bidang Prasarana dan Bina Usaha mempunyai fungsi : membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan tugas di bidang prasarana dan dan pembinaan usaha, pada kegiatan pembangunan dan pengawasan prasarana pertanian.

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas peternakan dan kesehatan hewan.

f. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha perkebunan dan penyuluhan.

2.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan dibidang Perkebunan dan Peternakan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

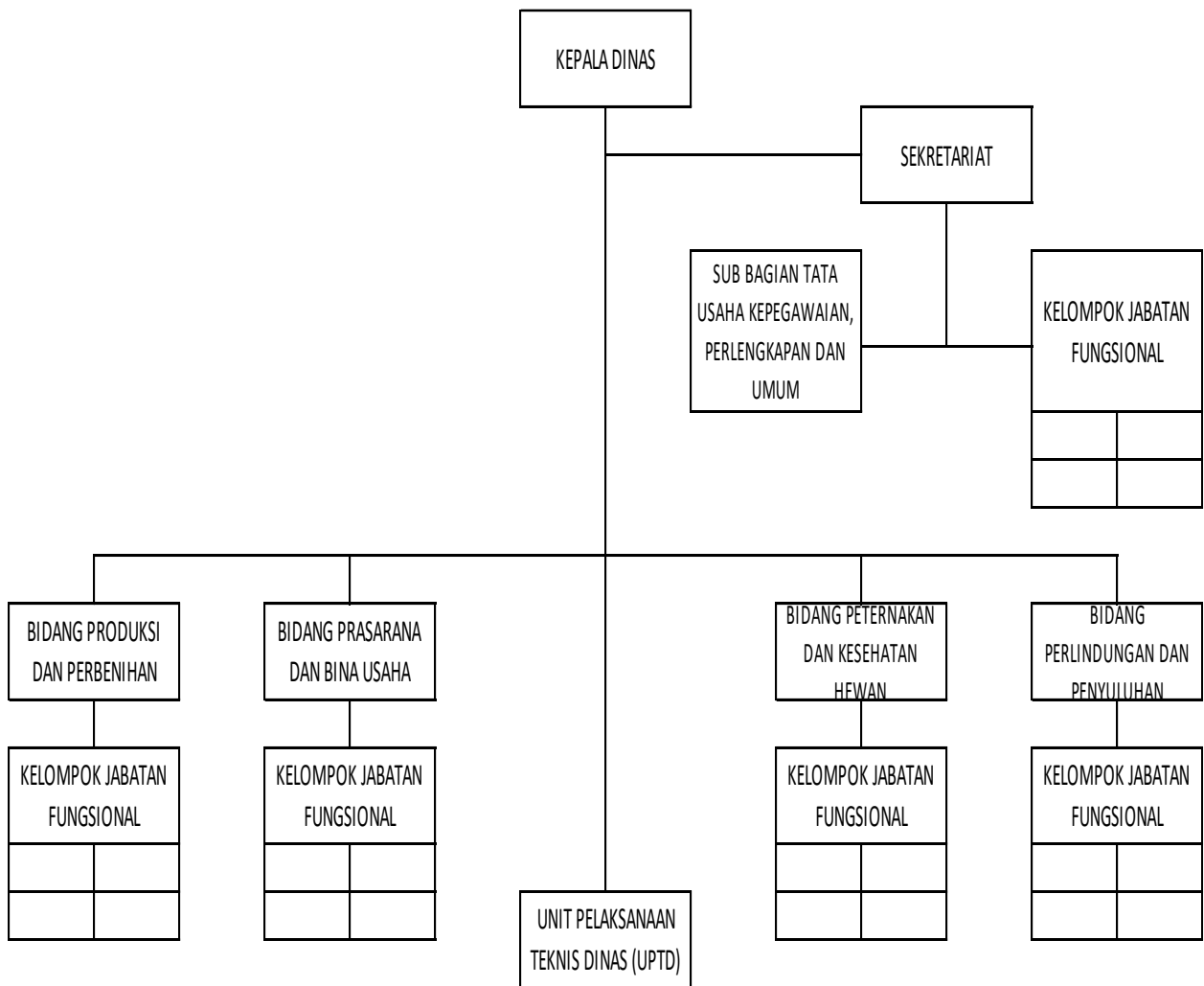
1. Penyusunan program di bidang Perkebunan dan Peternakan;
2. Perumusan kebijakan di bidang Perkebunan dan Peternakan;
3. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta dan pelayanan umum di bidang Perkebunan dan Peternakan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan dan Peternakan;
6. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan;
7. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian Perlengkapan dan Umum
- c. Bidang Produksi dan Perbenihan
- d. Bidang Prasarana dan Bina Usaha
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan
- f. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 2.1

**STUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKANKABUPATEN KUBU RAYA**



Tabel.2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP			BB (70-80)	BB (70-80)	BB (73,40)	BB (73,50)	BB (73.10)	BB (74,1)	BB (74,5)	BB (74,7)	
2	PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan			1.388.483	1.446.898	1.573.851	1.657.639	2.187.831,09		1.573.851	1.657.639	
			Produktivitas Perkebunan	2,26	2,34	2,55	2,78	2,26		2,55	2,78	
3	PDRB Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan			830.176,30	883877,6	937.576,80	991.280	869.072,82		937.576,80	991.280	
			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	90,60	91,506	92,41	94,26	90,60		92,41	94,26	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu Kabupaten termuda di Kalimantan Barat dengan luas mencapai 6.985,24 Km² yang terdiri atas 9 Kecamatan dengan luasan penggunaan lahan Hutan Negara (355.400 Ha atau 50,88%), Perkebunan (101.896 Ha atau 14,59%) dan Sawah Pasang Surut (49.339 Ha atau 7,06%).

Berdasarkan hal tersebut, sector Perkebunan dan sektor Peternakan merupakan penyangga bagi peningkatan ekonomi di sektor Pertanian terutama dalam pencapaian PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Karena itulah kedudukan Perangkat Daerah yang mengatur kedua sektor ini penting untuk didirikan yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Dinas Perkebunan dan Peternakan saat ini beralamat di Jl. Adi Sucipto Km. 15,2 Sungai Raya, dengan dua Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang masing-masing berada di Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Rasau Jaya.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan di bidang Perkebunan dan Peternakan, antara lain:

➤ **Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan**

Salah satu permasalahan yang paling sering muncul terkait sektor Perkebunan terutama Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan masyarakat, adalah konflik Perkebunan. Dinas Perkebunan dan Peternakan berperan sebagai fasilitator yang menjembatani agar investasi sektor Perkebunan tidak terganggu dan masyarakat tidak dirugikan.

➤ **Infrastruktur masih terbatas**

Luasnya Kabupaten Kubu Raya yang tersebar di beberapa titik dan jauh dari perkotaan, menyebabkan pembangunan infrastruktur belum terbangun secara maksimal.

➤ **Tumpang Tindih Perizinan dengan Sektor Lain;**

Hal ini terkait dengan makin begesernya pembangunan yang menyebabkan berisikan perizinan dalam hal ini terkait Perkebunan Besar Swasta. Terutama terkait dengan moratorium restorasi gambut.

➤ **Alih Fungsi Lahan**

Hal ini terkait dengan makin begesernya pembangunan yang menyebabkan berisikan dengan sektor Pertanian Padi (sawah) serta perumahan.

- Pengetahuan dan keterampilan petani lemah.

Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya, menyebabkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan mengalami hambatan;

- Kurangnya pengolahan sektor Hilir dari produk perkebunan dan peternakan

Hasil perkebunan dan peternakan lebih banyak dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan. Pengetahuan dan teknologi terkait pengolahan masih sangat sederhana dan terbatas.

- Struktur kepemilikan/penguasaan lahan sangat kecil.

Rata-rata kepemilikan keluarga tani terhadap perkebunan yang diusahakan masih kecil yaitu 1-2 Ha, sedangkan kepemilikan yang ideal dan memenuhi skala ekonomis adalah 3-5 Ha per Kepala Keluarga. Sedangkan tingkat ketertarikan petani untuk memiliki lahan usaha pembangunan perkebunan masih rendah.

- Kelembagaan belum berdaya.

Mencermati masalah kelembagaan pertanian ketahanan pangan, perkebunan maupun peternakan, maka perkembangan kelembagaan dapat dikatakan masih belum berdaya. Namun embrio untuk pemberdayaan kelembagaan sektor perkebunan dan peternakan telah terbentuk dan pada beberapa kasus juga dijumpai adanya perkembangan kelembagaan yang menguat dari waktu ke waktu.

- Dukungan Fasilitas Fisik dan Pendanaan Masih Lemah.

Fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mengakses potensi agribisnis pertanian, perkebunan dan peternakan seperti : jalan produksi, saluran drainase, kios saprodi dan lainnya belum memadai baik dari segi jumlah maupun mutunya. Kondisi tersebut disebabkan masih rendahnya dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun swasta.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada

masa mendatang, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat yang dalam hal ini melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Mengajukan penganggaran yang terkait dengan bimbingan teknis penguatan kelembagaan maupun penguatan sumberdaya manusia di Dinas Perkebunan dan Peternakan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Peningkatan koordinasi dinas / instansi / sektor terkait;
5. Sosialisasi peraturan perundangan dibidang Perkebunan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan;
6. Melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan kegiatan Perkebunan dan Peternakan salah satunya adalah dengan TEMBAKUL (Sistem Pembangunan Perkebunan Unggul);
7. Melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat;
8. Menyusun kajian tentang SDA secara terus-menerus (berkelanjutan).

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat mendukung kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya antara lain :

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 107).
- b. Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan yang tinggi.
Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terdepan dan berkualitas.
- c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai DISBUNNAK dan sesama pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pimpinan Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu team work selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Dinas Perkebunan dan Peternakan.

d. Tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai DISBUNNAK berpendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai Perangkat Daerah yang baru beberapa kali mengalami perubahan Perangkat Daerah, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melakukan beberapa kali penyesuaian terhadap anggaran. Perubahan perangkat daerah yang dialami Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya, antara lain :

- Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan (Hutbuntam) Kabupaten Kubu Raya;
- Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan (DKP3) Kabupaten Kubu Raya;
- Dinas Perkebunan Kabupaten (Disbun) Kubu Raya;
- Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Kubu Raya.

Tabel. 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting					
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)						
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
3	27	01					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27	01	...				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Kubu Raya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	BB (73,4)	6.864.186.639	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Kubu Raya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	BB (73,4)	6.864.186.639
3	27	01	2.01				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	73.800.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	73.800.000
3	27	01	2,01	0001			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	5.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	5.000.000
3	27	01	2,01	0002			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000
3	27	01	2,01	0003			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
							Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	5.000.000	
3	27	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	1	4.000.000	
3	27	01	2,01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5.800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	5	5.800.000	
3	27	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	45.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	45.000.000	
3	27	01	2,02	...	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	5.101.387.039	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	5.101.387.039	
3	27	01	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Kab Kubu Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	5.091.787.039	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Kab Kubu Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	5.091.787.039	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
							Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	01	2,02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.000.000	
3	27	01	2,02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	5.600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	5.600.000	
3	27	01	2,03	...	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat / Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	15	62.999.600	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat / Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	15	62.999.600	
3	27	01	2,03	0001	Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3.999.600	Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3.999.600	
3	27	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	
3	27	01	2,03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	4.000.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	4.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)					
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	15.000.000	
3	27	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	33	230.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	33	230.000.000	
3	27	01	2,05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	60.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	60.000.000	
3	27	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	120.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	120.000.000	
3	27	01	2,05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	50.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	50.000.000	
3	27	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	559.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	559.000.000	
3	27	01	2,06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
								Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
3	27	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	1	75.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	1	75.000.000		
3	27	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	170.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	170.000.000		
3	27	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket(foto kopi, spanduk, karangan	1	47.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kab Kubu Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket(foto kopi, spanduk, karangan	1	47.000.000		
3	27	01	2,06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	365	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	365	5.000.000		
3	27	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	108	225.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	108	225.000.000		
3	27	01	2,06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD (website)	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD (website)	Kab Kubu Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30.000.000		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
							Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	15	355.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	15	355.000.000	
3	27	01	2,07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	255.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	255.000.000	
3	27	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	
3	27	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	386.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	386.000.000	
3	27	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	100.000.000	
3	27	01	2,08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	286.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	286.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target		Kebutuhan Dana (Rp.)
							Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	50	96.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Kubu Raya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	50	96.000.000	
3	27	01	2,09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	32.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	32.000.000	
3	27	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Kubu Raya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	15.000.000	
3	27	01	2,09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	24.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	24.000.000	
3	27	01	2,09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	25.000.000	

Kode				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Produktivitas Pekebunan	Ton/Ha/tahun	2,550	3.050.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Produktivitas Pekebunan	Ton/Ha/tahun	2,550	3.050.000.000	
					Kab Kubu Raya	Produksi Peternakan	Ton/Thn	18327	2.400.000.000		Kab Kubu Raya	Produksi Peternakan	Ton/Thn	18327	2.400.000.000	
3	27	02	2,01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana perkebunan	Laporan	1	1.450.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana perkebunan	Laporan	1	1.450.000.000	
3	27	02	2,01	0002 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1.450.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1.450.000.000	
3	27	02	2,02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1.600.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1.600.000.000	
3	27	02	2,02	0002 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab Kubu Raya	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	100.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab Kubu Raya	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	100.000.000	
3	27	02	2,02	0003 Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab Kubu Raya	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1.250.000.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab Kubu Raya	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1.250.000.000	
3	27	02	2,02	0004 Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab Kubu Raya	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	250.000.000	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab Kubu Raya	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	250.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 27 02 2,03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Laporan	8	200.000.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Laporan	8	200.000.000	
3 27 02 2,03 0001	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab Kubu Raya	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	8	200.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab Kubu Raya	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	8	200.000.000	
3 27 02 2,06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Laporan	1	2.200.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Laporan	1	2.200.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 27 02 2,06 0003	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab Kubu Raya	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	200	2.000.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab Kubu Raya	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	200	2.000.000.000	
3 27 02 2,06 0004	Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab Kubu Raya	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	3.000	200.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab Kubu Raya	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	3.000	200.000.000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Daya dukung prasarana perkebunan terhadap produktivitas kebun	%	0,25	3.405.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Daya dukung prasarana perkebunan terhadap produktivitas kebun	%	0,25	3.405.000.000	
		Kab Kubu Raya	Daya dukung prasarana peternakan terhadap produktivitas ternak	%	1	150.000.000		Kab Kubu Raya	Daya dukung prasarana peternakan terhadap produktivitas ternak	%	1	150.000.000	
3 27 03 2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pengembangan prasarana perkebunan	Laporan	1	3.175.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pengembangan prasarana perkebunan	Laporan	1	3.175.000.000	
3 27 03 2,01 0017	Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	dokumen	3	175.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	dokumen	3	175.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
							Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	03	2,01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		800.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		800.000.000	
3	27	03	2,01	0007	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Kab Kubu Raya	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	2.200.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Kab Kubu Raya	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1	2.200.000.000	
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Perkebunan	Laporan	1	230.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Perkebunan	Laporan	1	230.000.000	
3	27	03	2,02	0009	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	230.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab Kubu Raya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	230.000.000	
3	27	03	2,03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pengelolaan wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	5	150.000.000	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pengelolaan wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	5	150.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 27 03 2,03 0001	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab Kubu Raya	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan	Laporan	5	150.000.000	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab Kubu Raya	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan	Laporan	5	150.000.000	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab Kubu Raya	Persentase Status Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	%	100	1.050.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab Kubu Raya	Persentase Status Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	%	100	1.050.000.000	
3 27 04 2,01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan jenis penyakit hewan yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	laporan	11	250.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan jenis penyakit hewan yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	laporan	11	250.000.000	
3 27 04 2,01 0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	Laporan	6	250.000.000	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	Laporan	6	250.000.000	
3 27 04 2,03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan sample dan Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Laporan	5	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan sample dan Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Laporan	5	400.000.000	
3 27 04 2,03 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab Kubu Raya	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	5	400.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab Kubu Raya	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	5	400.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	laporan	1	400.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	laporan	1	400.000.000	
3 27 04 2.04 0002	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab Kubu Raya	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	15	250.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab Kubu Raya	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	15	250.000.000	
3 27 04 2.04 0010	Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab Kubu Raya	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	150.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kab Kubu Raya	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	30	150.000.000	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Persentase Perlindungan perkebunan	%	77	349.999.278	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Persentase Perlindungan perkebunan	%	77	349.999.278	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana perkebunan Kabupaten	laporan	1	349.999.278	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana perkebunan Kabupaten	laporan	1	349.999.278	

Kode	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)					
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Kubu Raya	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	150	174.999.639	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Kubu Raya	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	150	174.999.639	
3	27	05	2.01	0003	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Kubu Raya	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	50.000	174.999.639	Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Kubu Raya	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	50.000	174.999.639	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Persentase Perkebunan terdaftar	%	71	300.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Persentase Perkebunan terdaftar	%	71	300.000.000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pertimbangan teknis untuk Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	Laporan	1	300.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan pertimbangan teknis untuk Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	Laporan	1	300.000.000	
3	27	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	2	150.000.000	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	2	150.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)					
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
3	27	06	2.01	0005	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha	Kab Kubu Raya	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	2	150.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha	Kab Kubu Raya	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	2	150.000.000	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Cakupan Bina Kelempok Pekebun	%	2,07	409.697.956	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab Kubu Raya	Cakupan Bina Kelempok Pekebun	%	2,07	409.697.956	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Pelaksanaan Penyuluhan Perkebunan	Laporan	1	409.697.956	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab Kubu Raya	Jumlah laporan Pelaksanaan Penyuluhan Perkebunan	Laporan	1	409.697.956	
3	27	07	2.01		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab Kubu Raya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	409.697.956	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab Kubu Raya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	409.697.956	

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya baru berdiri pada Bulan Desember 2021. Sektor Peternakan di tahun 2021, masih berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sementara sektor Perkebunan berada di Dinas Perkebunan. Jika kita melihat dari segi ketepatan sasaran, maka dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2021 pada bidang Perkebunan dan Peternakan, berkaitan dengan manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat sudah sesuai dengan yang diajukan masyarakat yang dalam hal ini melalui kelompok masyarakat. Hanya saja dengan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka tidak semua dapat dicover oleh anggaran perangkat daerah. Oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan program dan kegiatan yang sama dimasa mendatang untuk mengcover seluruh usulan dari kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

Dengan lahirnya Permendagri 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian disusul dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut hingga capaian indikator sub kegiatan.

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Nama PD : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi		Besaran Volumen		Catatan Penting
		Alamat	Kecamatan	Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					
	Pengadaan Herbisida	Sungai Kakap	Sungai Kakap	1	Liter	Diakomodir
	Pengadaan Herbisida	Sungai Raya	Sungai Raya	1	Liter	Diakomodir
	Pengadaan Herbisida	Ds. Batu Ampar	Batu Ampar	1	Liter	Diakomodir
	Pengadaan Herbisida	Ds Padang Tikar	Batu Ampar	1	Liter	Diakomodir
	Pengadaan Herbisida	Ds. Jeruju Besar	Sungai Kakap	1	Liter	Diakomodir
	Pengadaan Pupuk NPK Perkebunan	Sungai Kakap	Sungai Kakap	1	Kg	Diakomodir
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain					

	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					
	Pengadaan ternak sapi bali betina	Desa Teluk Kapuas	Sungai Raya	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit Kambing kacang betina	Terentang	Terentang	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan ternak sapi bali betina	Desa Parit Baru	Sungai Raya	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit Kambing kacang betina	Desa sungai kerawang	Batu Ampar	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan ternak sapi bali betina	Kelompok Tani Sekahtera , Kab. Kubu Raya		1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan ternak sapi bali betina	Desa Ambarawa	Batu Ampar	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit kambing bligon betina	Kelompok Tani Sekahtera , Kab. Kubu Raya		1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit Kambing kacang betina	Batu Ampar	Batu Ampar	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit Kambing kacang betina	Desa sungai kerawang	Batu Ampar	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan ternak sapi bali betina	Desa Olak-Olak	Kubu	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan ternak sapi bali jantan	Kelompok Tani Tunas Muda	Sungai Raya	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan ternak sapi bali jantan	Desa Tebang Kacang	Sungai Raya	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit Kambing kacang betina	Kubu	Kubu	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit kambing kacang jantan	Desa Durian	Sungai Ambawang	1	ekor	Diakomodir

	Pengadaan Bibit kambing kacang jantan	Poktan Hijau Asri Desa Durian	Sungai Ambawang	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit Kambing kacang betina	Dusun Sungai RT 004 RW 001 Jawa Desa Korek POKTAN SEJAHTERA ,	Sungai Ambawang	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit kambing bligon betina	(TUNAS MUDA) dusun pelaik Rt/Rw 001/003 desa simpang kanan	Sungai Ambawang	1	ekor	Diakomodir
	Pengadaan Bibit babi betina	Desa Teluk Bakung	Sungai Ambawang	1	ekor	Diakomodir
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian					
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					
	Pengadaan Alat Pengolah VCO/Minyak Goreng	Sungai Kakap	Sungai Kakap	1	Paket	Diakomodir
	Pengadaan Alat Pengolah Biji Kopi	DUSUN BANYUAT ES. RT 001 RW 002 Pasak Piang	Sungai Ambawang	1	Paket	Diakomodir
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					

	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengadaan Vitamin Ayam (Vita Stres)	Batu Ampar	Batu Ampar	1	Box	Diakomodir
	Pengadaan Vitamin Ayam (Vita Stres)	Sungai Kakap	Sungai Kakap	1	Box	Diakomodir
	Pengadaan Vitamin Ayam (Vita Stres)	Terentang	Terentang	1	Box	Diakomodir
	Pengadaan Vitamin Ayam (Vita Stres)	Kubu	Kubu	1	Box	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional di kelompokkan ke dalam 9 (Sembilan) bidang pembangunan, yaitu :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Bidang Politik;
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
7. Bidang Hukum dan Operator;
8. Bidang Wilayah dan Aparatur;
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow system*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam Rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

A. SEKRETARIAT

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten Kota**
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. URUSAN PERTANIAN SUB PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organism Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit

- Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu)
 - Daerah Kabupaten/Kota Lain
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner
- Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/ Kota
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
6. Program Penyuluhan Pertanian
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategi.

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	27	01							
3	27	01	...						
3	27	01					
3	27	01	2.01						

3	27	01	2,01	000 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3.999.600,00	APBD	2	5.000.000
3	27	01	2,01	000 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.898.940,00	APBD	1	5.000.000
3	27	01	2,01	000 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.249.460,00	APBD	1	4.000.000
3	27	01	2,01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000	APBD	1	5.000.000
3	27	01	2,01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.249.460,00	APBD	1	4.000.000
3	27	01	2,01	000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	4.000.000	APBD	5	5.800.000

3	27	01	2,01	000 7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	40.454.780,00	APBD	1	45.000.000
3	27	01	2,02	...	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	5.100.285.495	APBD	12	5.355.976.390
3	27	01	2,02	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	5.091.787.039	APBD	33	5.346.376.390
3	27	01	2,02	000 5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.998.456,00	APBD	1	4.000.000
3	27	01	2,02	000 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan	2	4.500.000,00	APBD	1	5.600.000
3	27	01	2,03	...	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat /Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	15	37.999.600		15	62.999.600
3	27	01	2,03	000 1	Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3.999.600	APBD	2	3.999.600
3	27	01	2,03	000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan	Dokumen	1	20.000.000	APBD	1	40.000.000

						Barang Milik Daerah SKPD							
3	27	01	2,03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	4.000.000	APBD	5	4.000.000
3	27	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	7	10.000.000	APBD	7	15.000.000
3	27	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	33	169.625.394	APBD	33	300.000.000
3	27	01	2,05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.280.000,00	APBD	60	130.000.000
3	27	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	99.997.394,00	APBD	200	120.000.000
3	27	01	2,05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	39.348.000,00	APBD	5	50.000.000
3	27	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	513.457.308	APBD	12	565.500.000

3	27	01	2,06	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.498.000,00	APBD		1	8.000.000
3	27	01	2,06	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Paket	1	58.091.801,00	APBD		1	75.000.000
3	27	01	2,06	000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	152.868.407,00	APBD		1	170.000.000
3	27	01	2,06	000 5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	45.999.100,00	APBD		1	47.000.000
3	27	01	2,06	000 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	365	5.000.000,00	APBD		365	5.500.000
3	27	01	2,06	000 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	108	225.000.000,00	APBD		108	230.000.000
3	27	01	2,06	001 1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD (website)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	25.000.000	APBD		1	30.000.000
3	27	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	8	110.000.000	APBD		17	355.000.000

3	27	01	2,07	000 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	60.000.000,00	APBD		12	255.000.000
3	27	01	2,07	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	50.000.000	APBD		5	100.000.000
3	27	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	370.000.000	APBD		48	401.000.000
3	27	01	2,08	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	84.000.000	APBD		36	115.000.000
3	27	01	2,08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	286.000.000	APBD		12	286.000.000
3	27	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	50	96.000.000	APBD		50	96.500.000
3	27	01	2,09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	32.000.000	APBD		1	32.000.000
3	27	01	2,09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	15.000.000	APBD		12	15.000.000

3	27	01	2,09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	24.000.000	APBD		35	24.500.000
3	27	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	25.000.000	APBD		2	25.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pekebunan	Ton/Ha/tahun	2,55	1.370.322.828	APBD		2,780	3.675.000.000
						Produksi Peternakan	Ton/Thn	18327	709.300.883	APBD		18.694	2.400.000.000
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana perkebunan	Laporan	1	652.376.465	APBD		1	1.750.000.000
3	27	02	2,01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	652.376.465,00	APBD		1	1.750.000.000
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	717.946.363	APBD		1	1.925.000.000
3	27	02	2,02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	55.000.000,00	APBD		1	125.000.000

3	27	02	2,02	000 3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	550.000.000	APBD		1	1.500.000.000
3	27	02	2,02	000 4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	112.946.363,00	APBD		1	300.000.000
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan mutu dan peredaran benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Laporan	8	55.916.500	APBD		0	-
3	27	02	2,03	000 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	8	55.916.500,00	APBD		8	200.000.000
3	27	02	2,06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Laporan	1	653.384.383	APBD		8	200.000.000
3	27	02	2,06	000 3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	20	483.384.383	APBD		1	2.200.000.000

3	27	02	2,06	000 4	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	2000	170.000.000	APBD		-	-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Daya dukung prasarana perkebunan terhadap produktivitas kebun	%	0,25	1.400.000.000	APBD		200	2.000.000.000
						Daya dukung prasarana peternakan terhadap produktivitas ternak	%	1	72.000.000	APBD		2000	200.000.000
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Laporan	1	1.200.000.000	APBD		0,25	3.405.000.000
3	27	03	2,01	001 7	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	dokumen	3	450.000.000	APBD		1	150.000.000
3	27	03	2,01	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	300.000.000	APBD		1	3.175.000.000
3	27	03	2,01	000 7	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2	450.000.000	APBD		3	175.000.000

3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Perkebunan	Laporan	1	200.000.000	APBD		0	-
3	27	03	2,03	000 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	200.000.000	APBD		1	800.000.000
3	27	03	2,03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	5	72.000.000	APBD		10	2.200.000.000
3	27	03	2,03	000 1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	5	72.000.000	APBD		1	230.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Status Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	%	100	805.000.000	APBD		1	230.000.000
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan jenis penyakit hewan yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	laporan	11	200.000.000	APBD		5	150.000.000

3	27	04	2,01	000 8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	5	200.000.000	APBD		100	1.150.000.000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sample dan Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	Laporan	5	305.000.000	APBD		11	300.000.000
3	27	04	2.03	000 1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	laporan	1	305.000.000	APBD		0	-
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	1	300.000.000	APBD		6	300.000.000
3	27	04	2.04	000 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	15	150.000.000	APBD		5	450.000.000
3	27	04	2.04	001 0	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha	30	150.000.000	APBD		5	450.000.000

3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Perlindungan perkebunan	%	77	349.999.278	APBD		1	400.000.000
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana perkebunan Kabupaten	laporan	1	349.999.278	APBD		10	-
3	27	05	2.01	000 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	150	174.999.639	APBD		15	250.000.000
3	27	05	2.01	000 3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	50000	174.999.639	APBD		30	150.000.000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perkebunan terdaftar	%	71	279.860.094	APBD		78	3.849.999.206
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pertimbangan teknis untuk Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	Laporan	1	279.860.094	APBD		1	3.849.999.206

3	27	06	2.01	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen	2	121.909.695,00	APBD		150	1.924.999.603
3	27	06	2.01	000 5	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	2	157.950.399,00	APBD		50000	1.924.999.603
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Pekebun	%	2,07	140.179.955	APBD		72	300.000.000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan Pelaksanaan Penyuluhan Perkebunan	Laporan	1	140.179.955	APBD		1	300.000.000
3	27	07	2.01		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	140.179.955,00	APBD		2	150.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 akan menjadi pedoman pada tataran implementasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan renja SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Total Pagu Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 sebesar Rp. 17.778.883.873 yang terdiri dari terdiri dari 7 program kegiatan yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.764.186.639
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 5.450.000
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 3.555.000.000
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewean dan Kesehatan Masyarakat veteriner Rp. 1.200.000.000
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 349.999.278
6. Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 300.000.000
7. Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 409.697.956

Rincian Pagu indikatif Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Pagu Indikatif Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)
3	27	01			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	27	01	...		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.584.883.075
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.458.220.037
3	27	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.852.240
3	27	01	2,01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.600
3	27	01	2,01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.898.940
3	27	01	2,01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.249.460
3	27	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.000.000
3	27	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.249.460
3	27	01	2,01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000
3	27	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.454.780
3	27	01	2,02	...	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.100.285.495

3	27	01	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	5.091.787.039
3	27	01	2,02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.998.456
3	27	01	2,02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	4.500.000
3	27	01	2,03	...	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat /Daerah	37.999.600
3	27	01	2,03	0001	Sub Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.999.600
3	27	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
3	27	01	2,03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000
3	27	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
3	27	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.625.394
3	27	01	2,05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.280.000
3	27	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.997.394
3	27	01	2,05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39.348.000
3	27	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.457.308
3	27	01	2,06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.498.000

3	27	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.091.801
3	27	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.868.407
3	27	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	45.999.100
3	27	01	2,06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
3	27	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000
3	27	01	2,06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerinatahan Berbasis elektronik pada SKPD (website)	25.000.000
3	27	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000
3	27	01	2,07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000
3	27	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
3	27	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.000.000
3	27	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000
3	27	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.000.000
3	27	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.000.000
3	27	01	2,09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000

3	27	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan atau Lapangan	15.000.000
3	27	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000
3	27	01	2,09	0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.370.322.828
						709.300.883
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	652.376.465
3	27	02	2,01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	652.376.465
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	717.946.363
3	27	02	2,02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	55.000.000
3	27	02	2,02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	550.000.000
3	27	02	2,02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	112.946.363
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	55.916.500
3	27	02	2,03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	55.916.500
3	27	02	2,06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	653.384.383
3	27	02	2,06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	483.384.383

3	27	02	2,06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	170.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.400.000.000
						72.000.000
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	1.200.000.000
3	27	03	2,01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	450.000.000
3	27	03	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	300.000.000
3	27	03	2,01	0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	450.000.000
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	200.000.000
3	27	03	2,03	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	200.000.000
3	27	03	2,03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.000.000
3	27	03	2,03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	72.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	805.000.000
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
3	27	04	2,01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	305.000.000
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	305.000.000

3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	300.000.000
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	150.000.000
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	150.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	349.999.278
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	349.999.278
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	174.999.639
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	174.999.639
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	279.860.094
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	121.909.695
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	157.950.399
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	140.179.955
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	140.179.955
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	140.179.955
3	27	07	2.01		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	140.179.955

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya tahun 2025 akan menjadi pedoman pada tataran implementasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan rencana Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Seluruh program kerja yang ada akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama dan mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan mengacu pada RPD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Hasil kinerja Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan institusi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah dapat terukur dan berkesinambungan.

Dalam penyusunannya, Renja tahun 2025 ini disusun dalam dengan menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Renja ini memuat empat bidang utama sebagai pelaksana program kegiatan antara lain:

- **Sekretariat** mempunyai fungsi: membantu Kepala Dinas dalam penyusunan rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan

administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

- **Bidang Produksi dan Perbenihan** mempunyai fungsi: membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang produksi, dan pembenihan pada kegiatan Pembangunan dan Pengawasan Sarana Pertanian.
- **Bidang Prasarana dan Bina Usaha** mempunyai fungsi : membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan tugas di bidang prasarana dan dan pembinaan usaha, pada kegiatan pembangunan dan pengawasan prasarana pertanian.
- **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas peternakan dan kesehatan hewan.
- **Bidang Perlindungan dan Penyuluhan** mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, gangguan usaha perkebunan dan penyuluhan.

Dengan tersusunnya rencana kerja tahun 2025, maka diharapkan semua program dan kegiatan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan dan fokus pada capaian kinerja yang telah ditentukan.